



Manado Post (Hal. 1_1)

Selasa, 5 Mei 2020

Evaluasi Aliran Dana Covid-19

◆ Pengamat: Supaya Transparan dan Tepat Sasaran

PENYALURAN SEMBAKO PEMPROV:

SEMBARU PEMPROV:

◆ Pengamat: Supaya Transparan dan Tepat Sasaran

EDITOR: GRAND REGAR
PELIPUT: BALADEWA SETLIGHT

MANADO—Pandemik Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), tak dipandang sebelah mata oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan 15 kabupaten/kota. Berbagai strategi dilakukan dalam mengatasi pandemik global ini. Diantaranya penyaluran bantuan. Realisasi bantuan kini dituntut agar 'dikuliti' (evaluasi, red).

Jika dijumlahkan kekuatan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulut, kurang lebih Rp521 miliar yang menjadi refocusing dan realokasi APBD Tahun 2020 dalam penanganan Covid-19. Yaitu penanganan Kesehatan hingga dampak sosial ekonomi.

Untuk Pemprov Sulut, pada tahap pertama menggelontorkan Rp96,5 miliar dalam memerangi Covid-19. Dari alokasi Rp96,5 miliar, Rp50,5 miliar diberikan untuk penanganan kesehatan yang diperuntukkan bagi pengadaan ventilator, tandu darurat, bilik disinfektan, alat pelindung diri (APD), rapid tes, ruang isolasi, disinfektan, alkohol, vitamin, obat-obatan dan penunjang satuan tugas di bidang kesehatan.

► Baca **EVALUASI**...Hal.7

MINUT
Jumlah Paket **13.907**

MINAHASA
Jumlah Paket **2.069**

MANADO
Jumlah Paket **9.175**

BITUNG
Jumlah Paket **7.380**

BOLSEL
Jumlah Paket **150**

TOMOHOH
Jumlah Paket **5.706**

MITHA
Jumlah Paket **257**

BOLMUT
Jumlah Paket **3.000**

BOLTIM
Jumlah Paket **150**

MINSEL
Jumlah Paket **45**

BOLMONG
Jumlah Paket **1.939**

SANGIHE
Jumlah Paket **3.223**

SUMBER: DABOS PROVINSI SULUT





BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

Manado Post (Hal. 1_2)

Selasa, 5 Mei 2020

EVALUASI...

Sembungan Dari Hal. 1

Tak hanya sektor kesehatan yang kecipratan. Dalam melakukan penanganan dampak sosial ekonomi, pemprov juga menggelontorkan Rp45,5 miliar untuk bantuan sosial (bansos) dan Jaring Pengaman Sosial (JPS), yang didistribusikan ke 15 kabupaten kota. hingga (2/5), pemprov mencatat sudah ada 47.001 paket bahan pokok (bapok) yang disalurkan ke kabupaten/kota. Dari angka tersebut, Minahasa Utara (Minut) menerima bantuan bapok terbanyak. Disusul Manado dan Bitung (lihat grafis).

Anggaran tersebut dipas-tikan Gubernur Sulut Olly Dondokambey (OD) bakal dikawal secara ketat. Bahkan menurut OD, pengalokasian anggaran telah sesuai dengan peruntukan. Karena telah melalui proses kajian dengan melibatkan semua pihak terkait. "Alokasi anggaran ini tahap pertama. Itu telah sesuai dengan peruntukan. Semua kita bahas secara bersama dan transparan. Masyarakat bisa mengakses informasi ini secara terbuka. Dan total anggaran yang kita siapkan dari tahap pertama dan kedua sebanyak 171,5 miliar rupiah," ungkapnya.

Anggaran penanganan Covid-19 dari APBD Pemprov Sulut menurut OD, dikawal langsung pihak Kejati Sulut dan BPKP. "Pemprov Sulut itu sudah menggelontorkan dana sebesar 171,5 miliar dari APBD. Itu saya pastikan akan tepat sasaran. Saya sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dalam mengawal anggaran penanganan pandemi Covid-19. Kita juga buka ruang untuk masyarakat untuk terlibat dalam proses pengawasan," ungkapnya.

OD juga mengatakan, kesepakatan ini sebagai pedoman untuk melakukan kerja sama yang saling mendukung sesuai dengan ruang lingkup. Yaitu meliputi kegiatan pendampingan dan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan daerah, pencegahan,

pendampingan hukum, monitoring, evaluasi, dan tindakan hukum lain guna mencegah terjadinya KKN pada pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa guna keperluan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Sulut.

"Selain itu, kesepakatan bersama ini untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana penanganan Covid-19. Sehingga mendapatkan hasil optimal bagi masyarakat Sulut yang terdampak. Saya juga meminta kabupaten kota melakukan kerja sama dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses pengawasan anggaran. Ini sangat penting, agar tetap menjamin transparansi anggaran," ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Sulut, melalui Sekretaris Dinas Sosial Daerah Sulut Frederick Umboh mengatakan, dalam rangka penanganan Covid-19, bantuan yang bersifat reguler tetap jalan yang sarannya untuk keluarga miskin. Namun ada juga program BLT, PKH serta bantuan sembako. Umboh mengatakan, dari banyak karyawan yang dirumahkan, harus ada dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Dengan syarat tidak menerima program lain. Kemudian dari kebijakan Pemerintah Pusat ada bantuan sembako, yang didalamnya ada beras, ikan kaleng, yang pasti untuk kebutuhan pokok pangan ditambah dengan masker.

"Sasarannya adalah masyarakat dalam hal ini Keluarga dan bukan perorangan. Pendekatan yang dilakukan melalui lembaga keagamaan. Karyawan yang kena PHK bisa menerima bantuan dengan jujur keagamaan. Tidak menutup kemungkinan, ada satu keluarga yang mendapatkan PHK secara bersama. Sedangkan bantuan sembako kita siapkan ada 250 ribu paket sembako. BLT itu langsung dari Pemerintah Pusat dengan 110 ribu keluarga penerima, mereka yang menerima sudah ada dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Itu bukan nama baru. Data itu kemudian di kirim ke kabupaten/kota

untuk melakukan verifikasi," jabar Umboh.

Di sisi lain, Ekonom Sulut Dr Noldy Tuerah mengatakan, saat ini Sulut tidak memiliki pusat data informasi. Karena menurutnya, bantuan yang bisa diterima, ada sembilan klasifikasi dan itu harus terintegrasi datanya. "Masyarakat perlu tahu, contohnya bantuan yang disalurkan sudah dua kali di satu desa di Tondano. Namun tidak jelas, itu bantuan dari pemerintah mana? Apakah pusat, provinsi, kabupaten/kota atau desa. Karena tidak ada informasi lengkap yang bisa diakses masyarakat. Padahal akurasi data itu kunci kesuksesan penyaluran bantuan," jelasnya.

Keberhasilan jaminan sosial, menurut Tuerah, data yang dipakai harus ter-update sampai Maret 2020. "Kalau menggunakan data kemiskinan Sulut, 2019 itu tidak terupdate. Harus ada data center yang memang disiapkan. Jadi 9 klasifikasi, bisa langsung dicek masyarakat. Agar tidak ada duplikasi penerimaan bantuan. Masyarakat penerima saat ini tidak bisa mengakses nama atau daftar penerima. Data itu harus dibuka, dan dibeper sampai ke pemerintah desa. Agar supaya setiap keluarga mengetahui bantuan apa saja yang akan diterima, dan dari pemerintah mana saja. Wartawan saja tidak mengetahui siapa saja penerima bantuan. Karena tidak jelas, karena update data dinas sosial sangat terbatas," ungkapnya.

Sementara itu, Pakar Pemerintahan Dr Jhony Lengkong mendesak Pemprov Sulut dan pemerintah 15 kabupaten/kota untuk menggelar evaluasi penyaluran bantuan. Wajib dikupas tuntas untuk mengetahui ketepatan penyaluran. "Karena jika tidak dilakukan evaluasi, maka tidak bisa terukur apakah tepat sasaran bantuannya atau tidak. Kekuatan anggaran saat ini, sedang terbatas, jangan sampai menggelontorkan ke hal yang ternyata salah. Harus segera melakukan evaluasi. Kalau tidak tepat, maka pemerintah harus lagi merubah pola penyaluran atau data penerima," pungkasnya. (***)

BERSIH

Sembungan

Dalam lagi ya itu, jala membu baru s Hal it Gugus Covid-rapat k yang d Widod ratas t konor mengi ada v akan Kar nar b tetap lama dala gan j guni dan Dor paia Jawa

STI

Sam

L me ket dit k kr pe se La m ku ja

rt h s

rt

rt